

Analisis Nilai-Nilai Pancasila Universal dan Luhur serta Berdampak terhadap Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur

Analysis of Universal and Noble Pancasila Values and Impact on the Economy in East Kalimantan Province

Jiuhardi¹, Priyagus²

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ *Corresponding author:* priyagus@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal dan luhur diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta bagaimana pengaruhnya terhadap proses pemerataan, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kebijakan pembangunan daerah telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan yang inklusif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, termasuk ketimpangan ekonomi antar wilayah, ketergantungan pada sektor ekstraktif yang belum sepenuhnya berorientasi keberlanjutan, dan minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah.

Abstract

This research aims to analyze how the universal and noble values of Pancasila are implemented in economic development in East Kalimantan Province and how it affects the process of equity, social justice, and improving community welfare. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies, in-depth interviews, and limited observations. The results of the study show that some regional development policies have reflected the values of Pancasila, especially in the aspects of community economic empowerment, inclusive development, and human resource capacity building. However, there are a number of challenges that are still faced, including economic inequality between regions, dependence on extractive sectors that are not fully sustainability-oriented, and lack of public participation in the economic decision-making process. This study concludes that the application of Pancasila values makes a real contribution to strengthening social justice and improving welfare, although its effectiveness is greatly influenced by policy support and commitment of local governments.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2026 Jiuhardi, Priyagus

Article history

Received 2025-10-10

Accepted 2026-01-05

Published 2026-01-31

Kata kunci

Nilai universal;
Pembangunan
Ekonomi;
Keadilan Sosial;
Pemerataan;
Kesejahteraan
Masyarakat.

Keywords

*Universal values;
Economic
Development;
Social Justice; Equity;
Community Welfare.*

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai universal dan luhur. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur arah pembangunan nasional di berbagai bidang, termasuk dalam bidang perekonomian. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, Pancasila berperan penting dalam memastikan supaya kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan semata, tetapi juga memperhatikan aspek moralitas, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan keberlanjutan. Pancasila secara filosofis memberikan kerangka etika yang menolak liberalisme ekstrem sekaligus menolak sosialisme total, dan hadir sebagai jalan tengah yang humanis, demokratis, serta berkeadilan.

Kondisi perekonomian Indonesia yang sangat beragam antar wilayah menuntut penerapan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, terutama sektor pertambangan seperti batu bara, minyak dan gas bumi. Selama beberapa dekade, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur banyak bergantung pada sektor ekstraktif yang cenderung sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketergantungan tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan ekonomi antarwilayah, penurunan kualitas lingkungan, perubahan struktur sosial, serta ketidakseimbangan antara pembangunan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Selain itu, pembangunan industri ekstraktif seringkali menimbulkan dilematis antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan hidup masyarakat. Dalam banyak kasus, eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur tidak selalu memberikan kesejahteraan optimal bagi masyarakat lokal, bahkan beberapa daerah pedalaman masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pembangunan dengan nilai-nilai Pancasila seperti “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Ketimpangan tersebut menandakan pentingnya melakukan kajian kritis mengenai sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah menjadi landasan nyata dalam pembangunan ekonomi di wilayah ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah perekonomian Kalimantan Timur mulai mengalami perubahan signifikan dengan munculnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran IKN membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat setempat, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Di satu sisi, pembangunan ini membuka peluang baru seperti peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan sektor jasa, pengembangan UMKM, dan modernisasi infrastruktur. Namun di sisi lain, pembangunan IKN juga berpotensi menimbulkan tantangan besar, termasuk potensi marginalisasi masyarakat adat, perubahan kepemilikan lahan, tekanan terhadap lingkungan hidup, serta kesenjangan sosial antara penduduk pendatang dan masyarakat lokal. Semua dinamika ini menegaskan perlunya orientasi pembangunan yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, penghormatan martabat manusia, dan keadilan sosial sangat relevan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi yang tengah berlangsung di Kalimantan Timur. Dalam konteks ekonomi, prinsip musyawarah dan gotong royong juga menjadi elemen penting dalam menguatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Namun dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai tersebut seringkali menghadapi hambatan, baik akibat lemahnya pemahaman nilai Pancasila, dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek, maupun pengaruh globalisasi yang membawa budaya konsumtif dan individualis. Situasi seperti ini menunjukkan perlunya penelitian

ilmiah yang mampu mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik pembangunan ekonomi daerah.

Penerapan Pancasila dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dilihat hanya dari kebijakan formal semata, tetapi juga harus dianalisis dari perilaku masyarakat, pelaku usaha, aparat pemerintah, serta dinamika sosial yang mengiringinya. Pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, misalnya, mencerminkan lemahnya penegakan nilai Pancasila dalam aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Demikian pula ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antarwilayah menunjukkan perlunya menilai kembali efektivitas penerapan nilai keadilan sosial dalam sektor ekonomi. Oleh karena itu, analisis komprehensif mengenai hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan perekonomian Kalimantan Timur sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai arah pembangunan daerah.

Lebih jauh lagi, penelitian mengenai “Analisis Nilai-Nilai Pancasila Universal dan Luhur serta Berdampak terhadap Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur” menjadi relevan karena dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai dasar bangsa mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Dalam konteks transformasi ekonomi menuju era industri digital, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan, nilai-nilai Pancasila harus ditempatkan sebagai fondasi moral dan etika dalam mengambil keputusan strategis. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memandu kebijakan pemerintah daerah, praktik bisnis perusahaan, serta perilaku ekonomi masyarakat agar selaras dengan visi pembangunan nasional.

Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya merupakan bagian penting dalam penelitian karena memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, menjadi rujukan dalam membangun kerangka berpikir, serta memperkuat argumen mengenai pentingnya penelitian ini. Berbagai penelitian yang mengkaji hubungan antara nilai Pancasila, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, meskipun masih relatif terbatas dalam konteks spesifik daerah seperti Kalimantan Timur.

Penelitian tentang Pancasila sebagai Dasar Etika dan Kebijakan Pembangunan

Penelitian oleh Kaelan (2016) menyatakan bahwa Pancasila memiliki dimensi etika, ideologi terbuka, dan nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembangunan. Kaelan menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai dasar negara secara normatif, tetapi juga dapat menjadi paradigma pembangunan nasional dan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih etis. Studi ini relevan bagi penelitian saat ini karena memberikan dasar teoretis mengenai bagaimana Pancasila dapat menjadi rujukan moral dalam pembangunan ekonomi di daerah.

Penelitian lain oleh Magnis-Suseno (1999) menyoroti peran etika Pancasila dalam mencegah penyimpangan moral dalam praktik birokrasi dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa nilai moral yang kuat merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menguatkan asumsi bahwa tata kelola pembangunan ekonomi di daerah, termasuk Kalimantan Timur, harus berlandaskan pada etika Pancasila untuk menghindari korupsi, ketimpangan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Penelitian tentang Ekonomi Pancasila dan Keadilan Sosial dalam Pembangunan Daerah

Mubyarto (2000) melalui berbagai penelitiannya mengenai Ekonomi Pancasila menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kesejahteraan sosial mampu menciptakan pembangunan yang lebih merata dibandingkan dengan ekonomi liberal. Penelitian tersebut menemukan bahwa model

pembangunan ekonomi Indonesia harus mengutamakan pemerataan, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan. Temuan ini sangat relevan karena Kalimantan Timur merupakan daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang tinggi namun dengan tantangan pemerataan kesejahteraan yang signifikan.

Penelitian lain yang mendukung konsep Ekonomi Pancasila adalah penelitian oleh Soetrisno (2010), yang menganalisis penerapan nilai keadilan sosial dalam kebijakan pembangunan daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika pemerintah menerapkan prinsip keadilan sosial melalui kebijakan pro-rakyat seperti subsidi UMKM, akses pendidikan, dan penguatan koperasi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat secara signifikan. Studi ini secara langsung mendukung penelitian saat ini yang melihat bagaimana nilai Pancasila berdampak terhadap perekonomian daerah, khususnya di Kalimantan Timur.

Selain itu, studi oleh Abdullah (2017) mengenai pembangunan berbasis nilai-nilai Pancasila di daerah-daerah penghasil sumber daya alam menemukan bahwa daerah yang mengintegrasikan prinsip efisiensi dan keadilan dalam tata kelola pertambangan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan konflik sosial. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan nilai Pancasila dapat menjadi solusi bagi tantangan pembangunan di daerah yang kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur.

Penelitian tentang Modal Sosial, Budaya, dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Penelitian Putnam (2001) mengenai modal sosial telah menjadi rujukan utama dalam penelitian tentang pembangunan daerah. Ia menemukan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, kerja sama, norma kolektif, dan solidaritas memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan efektivitas pemerintahan lokal. Ketika dikaitkan dengan konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas nasional turut membentuk modal sosial yang dapat memperkuat pembangunan daerah. Temuan ini relevan bagi penelitian saat ini yang menyoroti bagaimana nilai-nilai sosial Pancasila mendukung efektivitas pembangunan ekonomi Kalimantan Timur.

Penelitian oleh Suryanegara (2019) yang dilakukan di Jawa Barat menunjukkan bahwa modal sosial berbasis nilai budaya lokal, seperti semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan musyawarah, berpengaruh positif terhadap keberhasilan program pembangunan desa. Penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai sosial dan budaya merupakan faktor penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Kalimantan Timur, research ini menjadi pembandingan penting bahwa nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat terutama dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Herawati & Hadi (2021) tentang hubungan antara nilai budaya, kebijakan ekonomi daerah, dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan menemukan bahwa daerah yang memiliki modal sosial tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Hasil penelitian ini mendukung argumentasi bahwa nilai Pancasila, yang mengandung unsur etika, solidaritas, dan keadilan sosial, dapat meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Ekonomi dalam Konteks Sumber Daya Alam

Penelitian Sachs (2015) menegaskan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi terutama di daerah yang menggantungkan diri pada sektor pertambangan dan sumber daya alam. Temuan ini erat kaitannya dengan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor ekstraktif. Sachs menyebutkan bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan akan menghasilkan pertumbuhan semu yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial dan

kemanusiaan, dapat menjadi pedoman moral bagi pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Studi oleh Setiawan (2020) mengenai pembangunan berkelanjutan di daerah penghasil batu bara menemukan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi pemerintah daerah, dan nilai gotong royong memiliki korelasi positif terhadap keberlanjutan ekonomi. Penelitian tersebut memperkuat asumsi bahwa sikap dan nilai-nilai sosial masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan daerah berbasis sumber daya.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa kajian tentang hubungan nilai Pancasila dengan pembangunan ekonomi telah dilakukan, tetapi sebagian besar masih bersifat umum dan belum berfokus pada konteks wilayah tertentu. Penelitian tentang penerapan Pancasila dalam kebijakan daerah masih terbatas, apalagi yang membahas secara khusus dampaknya terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam hal fokus wilayah, integrasi teori Pancasila dengan teori pembangunan ekonomi, serta analisis empiris mengenai dampaknya di Kalimantan Timur

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal dan luhur tercermin dalam aktivitas pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, serta bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi tata kelola, kebijakan, dan dinamika perekonomian daerah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) karena penelitian berfokus pada fenomena spesifik, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi di satu wilayah tertentu, yakni Provinsi Kalimantan Timur.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan fokus pada beberapa instansi dan lembaga yang terkait dengan pembangunan ekonomi, antara lain:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
- Pelaku usaha, komunitas UMKM, dan masyarakat setempat
- Akademisi dan tokoh masyarakat

Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama 3 bulan, mulai dari Juni–September 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.

Sampel

Penelitian menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Sampel mencakup:

- 5–7 pejabat atau staf teknis dari Bappeda, Disperindagkop UMKM, dan DPMPSTP.
- 5 pelaku usaha dan UMKM yang dianggap mewakili sektor ekonomi produktif.
- 3 akademisi atau pakar ekonomi/pembangunan.
- 5 tokoh masyarakat atau pemimpin komunitas.
- Total perkiraan sampel: 18–20 informan kunci.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis model Miles & Huberman yang meliputi:

- 1) Reduksi Data

Mengelompokkan, merangkum, dan menyeleksi data yang relevan terkait nilai-nilai Pancasila dan dampaknya terhadap perekonomian.

2) Penyajian Data

Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, matriks, dan pola hubungan untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan berdasarkan temuan, memverifikasi konsistensi informasi antar informan, dan menghubungkannya dengan teori serta tujuan penelitian.

Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Timeline Penelitian

Tabel 1. Timeline Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Kegiatan	Waktu
1	Persiapan	Penyusunan instrumen, perizinan, studi awal	Minggu 1-2
2	Pengumpulan Data	Wawancara, observasi, dokumentasi	Minggu 3-7
3	Pengolahan & Analisis Data	Reduksi, penyajian, verifikasi data	Minggu 8-10
4	Penyusunan Laporan	Penulisan bab hasil, pembahasan, kesimpulan	Minggu 11-12
5	Finalisasi & Seminar Hasil	Penyempurnaan laporan dan penyajian hasil	Minggu 13
Total waktu: ± 3 bulan			

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 20 informan kunci yang terdiri atas pejabat Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, praktisi ekonomi, pelaku UMKM, pelaku industri besar, akademisi, serta tokoh masyarakat adat yang memiliki wawasan mengenai implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan BPS Provinsi Kalimantan Timur, RPJMD tahun terakhir, laporan perkembangan UMKM dan koperasi, publikasi pemerintah daerah, serta kajian akademik yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi berbasis nilai Pancasila. Data ini kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kebijakan ekonomi daerah, bagaimana faktor pendukung dan penghambat memengaruhi implementasinya, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif meskipun sempat mengalami penurunan pada masa pandemi. Pemulihan ekonomi terjadi cukup cepat setelah pemerintah mendorong diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi industri dan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Indikator kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan bertahap, menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Di sisi lain, indikator ketimpangan ekonomi seperti Gini Ratio menunjukkan tren menurun, meskipun kesenjangan antara wilayah pesisir dan pedalaman tetap menjadi isu mendasar.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara konsisten mengarahkan kebijakannya untuk lebih inklusif, terutama melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi serta pembangunan berbasis desa. Selain itu, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah diterapkan di berbagai sektor seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat adat, lingkungan hidup, dan kesehatan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

menunjukkan adanya upaya penguatan nilai demokrasi ekonomi sebagai salah satu representasi nilai Pancasila.

Analisis Hasil

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tampak dalam berbagai kebijakan, program, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Setiap sila dalam Pancasila memiliki manifestasi yang berbeda dalam sektor perekonomian, namun secara keseluruhan saling melengkapi dalam membangun pola pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai moral, etika, dan integritas menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang tetap memerhatikan aspek kelestarian lingkungan, mengingat Kalimantan Timur selama ini bertumpu pada sektor pertambangan dan perkebunan yang memiliki risiko kerusakan ekosistem. Perusahaan-perusahaan besar diwajibkan menjalankan program CSR yang bukan hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga pembangunan fasilitas publik dan pelestarian lingkungan. Pelaksanaan CSR ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi harus mengandung nilai tanggung jawab moral dan tidak hanya mengejar keuntungan.

Sementara itu, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tercermin dalam upaya pemerintah memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial. Data penelitian menunjukkan bahwa banyak program pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Program pelatihan, bantuan akses permodalan, serta pendampingan UMKM menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi yang beradab dan berorientasi pada peningkatan harkat manusia.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam konteks daerah yang memiliki keragaman etnis seperti Kutai, Dayak, Banjar, Bugis, dan Jawa, pemerintah daerah berupaya menjaga harmoni sosial melalui mekanisme dialog dan mediasi, terutama dalam menghadapi konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan. Program perhutanan sosial dan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat lokal menjadi langkah strategis untuk menciptakan harmoni sosial, sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Harmoni dan persatuan ini menjadi modal sosial yang signifikan bagi terciptanya stabilitas ekonomi jangka panjang.

Pada implementasi sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, nilai demokrasi ekonomi tampak jelas dalam mekanisme partisipatif yang digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, terutama melalui Musrenbang tingkat desa hingga provinsi. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan ekonomi yang mereka butuhkan. Selain itu, penguatan koperasi sebagai institusi ekonomi berbasis kebersamaan memperlihatkan bahwa prinsip demokrasi ekonomi telah diterapkan secara konkret.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terlihat dari kebijakan pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Pemerintah melaksanakan berbagai program peningkatan infrastruktur seperti pembukaan jalan desa, pengembangan jaringan internet, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan listrik di daerah terpencil. Selain itu, hilirisasi industri juga dilakukan untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat lokal, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton dalam aktivitas ekonomi daerah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kegiatan Ekonomi

Faktor pendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur sangat beragam. Salah satu faktor utama adalah komitmen pemerintah daerah yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD. Kebijakan untuk memperkuat pembangunan berbasis desa dan pemberdayaan UMKM juga menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan demokrasi ekonomi.

Selain itu, perkembangan infrastruktur yang semakin merata di berbagai kabupaten/kota menjadi faktor pendukung penting. Infrastruktur yang memadai membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar, pasar, pendidikan, serta peluang usaha. Hal ini berkontribusi langsung pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Faktor pendukung lainnya adalah peran aktif sektor swasta melalui program CSR yang menysasar berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial budaya. CSR ini tidak hanya membantu pemerintah dalam pembangunan, tetapi juga menguatkan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam dunia usaha.

Namun, implementasi nilai Pancasila dalam ekonomi juga menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan terbesar adalah ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara. Ketergantungan ini menyebabkan ketimpangan ekonomi karena keuntungan lebih banyak dinikmati perusahaan besar, sementara masyarakat di sekitar tambang seringkali tidak mendapatkan manfaat signifikan. Kondisi ini menghambat terwujudnya nilai keadilan sosial.

Hambatan lainnya adalah ketimpangan kualitas SDM di daerah pedalaman. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan membuat masyarakat lokal sulit bersaing dalam dunia kerja formal yang membutuhkan kompetensi tertentu. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat juga menjadi penghambat signifikan. Konflik ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. Regulasi tata kelola lahan yang belum optimal memperburuk kondisi tersebut.

Dampak Penerapan Nilai-Nilai Pancasila terhadap Perekonomian, Pemerataan, dan Kesejahteraan Masyarakat

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur memberikan dampak positif terhadap pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak utama yang ditemukan adalah meningkatnya keadilan sosial melalui pemerataan infrastruktur dan akses ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Pemerintah daerah telah membangun berbagai fasilitas publik seperti jalan desa, jaringan listrik, internet, dan pasar rakyat yang membantu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, penerapan nilai kemanusiaan dan kerakyatan melalui program pemberdayaan UMKM dan koperasi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak UMKM di Kalimantan Timur yang berkembang signifikan berkat bantuan pelatihan, permodalan, serta pendampingan dari pemerintah maupun perusahaan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja baru.

Dampak positif lainnya adalah stabilitas sosial yang meningkat akibat implementasi nilai persatuan dan musyawarah dalam penyelesaian konflik sosial dan ekonomi. Stabilitas ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila di Kalimantan Timur berhasil memberikan arah pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian lebih, seperti ketergantungan pada sumber daya alam, ketimpangan wilayah, serta konflik lahan yang perlu penyelesaian komprehensif.

Pembahasan

Penelitian ini menguraikan secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila yang universal dan luhur terinternalisasi dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan uraian ini ditempatkan dalam konteks teori nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis pembangunan nasional dan dikaitkan dengan temuan empiris serta studi sebelumnya yang relevan.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur pada dasarnya tercermin dalam berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, terlihat dari semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa praktik eksploitasi sumber daya alam berlangsung secara bertanggung jawab dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sektor pertambangan dan energi, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim, semakin diarahkan untuk mematuhi standar pengelolaan yang beretika dan berkelanjutan. Kondisi ini selaras dengan pandangan teoritis Driyarkara dan Notonegoro yang menjelaskan bahwa nilai Ketuhanan mengharuskan setiap aktivitas pembangunan dilakukan dengan moralitas luhur dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan alam sebagai ciptaan Tuhan.

Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terlihat dalam meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan masyarakat terdampak pembangunan. Program-program peningkatan upah minimum, pelatihan tenaga kerja lokal, penguatan keselamatan kerja, serta penanganan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya menghadirkan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*). Pembahasan ini sejalan dengan teori pembangunan manusia (*human development*) Amartya Sen yang menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana martabat manusia dihormati dan kapasitas mereka ditingkatkan.

Dalam perspektif nilai Persatuan Indonesia, pembangunan ekonomi di Kaltim juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga keharmonisan antara beragam kelompok etnis dan budaya yang hidup berdampingan. Implementasi pembangunan yang melibatkan masyarakat adat Dayak, masyarakat pesisir, dan pendatang dari berbagai daerah menunjukkan bahwa nilai persatuan menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial yang mendukung iklim investasi. Hal ini selaras dengan literatur pembangunan sosial yang menegaskan bahwa stabilitas dan integrasi sosial merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya proyek-proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembahasan mengenai persatuan semakin relevan karena mendorong sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal agar tidak terjadi disrupsi sosial.

Selanjutnya, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) menjadi kanal partisipatif yang secara prinsip sudah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ekonomi mereka. Namun demikian, pembahasan ini juga perlu menyoroti temuan penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masih belum merata. Di beberapa wilayah pedalaman, masyarakat merasa belum sepenuhnya terlibat atau belum memiliki akses informasi yang memadai untuk ikut dalam perumusan kebijakan. Fenomena ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya oleh Wrihatnolo dan Nugroho yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering kali bersifat formalitas tidak sepenuhnya substantif jika kapasitas masyarakat dan kualitas penyelenggaraan forum belum memadai.

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan nilai yang paling banyak berinteraksi dengan konteks perekonomian daerah. Program pembangunan ekonomi di Kaltim, seperti pengembangan UMKM, bantuan permodalan, pembangunan

desa, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta program pengentasan kemiskinan, menunjukkan upaya nyata dalam mendorong pemerataan. Secara teoritis, hal ini selaras dengan konsep keadilan distributif yang menekankan pemerataan manfaat pembangunan kepada seluruh kelompok masyarakat. Namun, pembahasan ini juga perlu mencatat bahwa ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi tantangan signifikan, terutama antara kawasan perkotaan seperti Balikpapan dan Samarinda dengan kawasan pedalaman di Kutai Barat, Mahakam Ulu, atau Kutai Timur. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh konsentrasi investasi pada sektor yang bersifat kapital-intensif dan terkonsentrasi secara geografis. Kondisi ini memperkuat argumentasi para ahli pembangunan daerah yang menyatakan bahwa struktur ekonomi ekstraktif cenderung menimbulkan ketimpangan spasial jika tidak diseimbangkan dengan pembangunan sektor produktif berbasis masyarakat.

Ketika membahas faktor pendukung penerapan nilai-nilai Pancasila, penelitian menemukan bahwa aspek kebijakan memiliki peran yang dominan. Kehadiran RPJMD, visi pembangunan hijau (green economy), dan pembangunan IKN menjadi pemicu transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang ramah lingkungan, berkembangnya sektor-sektor baru seperti pertanian modern, perkebunan, pariwisata, dan energi terbarukan yang memberikan peluang kerja dan usaha yang lebih beragam. Kehadiran teknologi digital juga memperkuat efektivitas penerapan nilai kerakyatan melalui akses informasi yang lebih luas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Sebaliknya, mengenai faktor penghambat juga menunjukkan kompleksitas yang tidak dapat diabaikan. Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan masih menyebabkan terjadinya tekanan ekologis dan sosial yang menghambat penerapan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial secara menyeluruh. Tingginya ketimpangan infrastruktur antara wilayah yang dekat pusat ekonomi dan wilayah pedalaman menghambat pemerataan manfaat pembangunan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang belum merata menyebabkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan bersaing dalam ekonomi modern masih terbatas. Masalah birokrasi dan tumpang tindih regulasi juga sering menjadi penghambat penerapan nilai kerakyatan dan keadilan, karena proses perizinan yang lambat dan tidak seragam dapat menurunkan efektivitas kebijakan ekonomi yang telah dirancang.

Mengenai dampak penerapan nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap arah pembangunan ekonomi Kaltim. Penerapan nilai-nilai tersebut terbukti berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang tersentuh pembangunan. Program pengembangan UMKM, bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun demikian, pembahasan ini juga menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan sosial secara menyeluruh masih memerlukan strategi lanjutan, terutama dalam memperluas akses kesempatan ekonomi dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Secara umum, hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar normatif bagi pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi pedoman operasional yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa semakin kuat komitmen pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, semakin besar pula kemungkinan tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang universal dan luhur telah tercermin dalam berbagai aspek pembangunan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, meskipun tingkat penerapannya belum merata di seluruh sektor dan wilayah. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial tampak terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah, seperti pada upaya menjaga etika pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta penguatan stabilitas dan harmonisasi sosial sebagai landasan tumbuhnya iklim investasi. Penerapan nilai-nilai tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat, serta berbagai program pemerataan ekonomi dan pemberdayaan UMKM yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

Faktor pendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian Kaltim meliputi adanya komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan strategis yang mengarah pada pembangunan inklusif, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta berkembangnya sektor ekonomi produktif di luar sektor tambang. Namun, terdapat pula faktor penghambat berupa ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur antarwilayah, dan adanya hambatan birokrasi yang masih mengurangi efektivitas kebijakan pembangunan berbasis Pancasila.

Dari sisi dampak, penerapan nilai-nilai Pancasila terbukti memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah, terutama dalam aspek keadilan sosial, pemerataan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program ekonomi kerakyatan, penguatan UMKM, pembangunan desa, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan telah mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, ketimpangan ekonomi antarwilayah dan disparitas akses terhadap kesempatan ekonomi menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan filosofis yang relevan dan efektif dalam mengarahkan pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. Penerapannya mampu mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, asalkan didukung oleh keselarasan antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan komitmen sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. 2020. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara: Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adi, S. 2021. "Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145-160.
- Arifin, Z. 2019. Pembangunan ekonomi daerah: Teori dan praktik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 2020. Pedoman Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: BPIP.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2024. Provinsi Kalimantan Timur dalam angka 2024. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Bungin, B. 2021. Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darmadi, H. 2018. Pendidikan Pancasila dalam Perspektif Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta.
- Darmini, M., & Santosa, B. 2021. "Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi nasional". *Jurnal Pembangunan Nasional*, 18(2), 112-126.
- Handayani, R., & Wijaya, A. 2022. "Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi di Kalimantan Timur". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 45-60.

- Hatta, M. 2019. "Nilai-nilai keadilan sosial dalam ekonomi kerakyatan". *Jurnal Ekonomi Pancasila*, 5(1), 22–34.
- Hidayat, R., & Suharto, B. 2021. "Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi lokal". *Jurnal Ekonomi Pancasila*, 5(2), 45–62.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2021. *Indeks Penguatan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Pancasila*. Jakarta: Pusat Kebijakan Regional.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2018. *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter dan ekonomi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Nilai Pancasila*. Jakarta: Bappenas.
- Magnis-Suseno, F. 2016. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki, P. 2022. *Ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial: Perspektif Pancasila*. Bandung: Alfabeta.
- Mubyarto. 2020. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Pemikiran*. Yogyakarta: BPF.
- Notonagoro. 2019. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2022. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2021-2026*. Samarinda: Pemprov Kaltim.
- Prasetyo, A. 2021. "Dampak Nilai-Nilai Pancasila terhadap Pertumbuhan UMKM di Kalimantan Timur (Tesis Magister)". Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Rasyid, R. 2021. "Dampak penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap pembangunan daerah". *Jurnal Ketatanegaraan*, 4(3), 77–89.
- Santoso, I. 2020. "Ekonomi Pancasila dan pembangunan nasional". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145–162.
- Saputra, E. 2020. "Pancasila sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". *Jurnal Studi Pancasila*, 5(3), 78-92.
- Subekti, A., & Wijaya, T. 2020. Strategi internalisasi nilai Pancasila dalam pembangunan daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(1), 33–49.
- Suryadinata, L. 2020. *Pancasila dan Nasionalisme Ekonomi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. 2018. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2020. *Economic Development* (12th ed.). New York: Pearson.
- Widodo, J. 2022. *Ekonomi Berkeadilan dan Visi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Setneg.
- World Bank. 2022. *Economic Growth and Pancasila Values in Indonesia*. Diakses dari <https://www.worldbank.org> pada 10 Mei 2024.